

Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan BUMDES Subur Makmur Lestari Desa Wisata Tlogoweru

Sukma Tirta Mayasari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wahid Hasyim
Email: sukmatirt@gmail.com

Ernawati Budi Astuti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wahid Hasyim
Email: erna_fe@unwahas.ac.id

Received: August 2023, Revised: November 2023, Accepted: December 2023

ABSTRACT

This research aims to determine the Accountability of the Financial Reports of Village-Owned Enterprises (BUMDES) Subur Makmur Lestari in the Tlogoweru Tourism Village, Guntur District, Demak Regency. The focus of this research is Financial Reports and Vertical & Horizontal Accountability. This research was conducted in Tlogoweru Village, Guntur District, Demak Regency. By using a qualitative descriptive method. Sources of data and information needed in this research were obtained from BUMDES financial reports and informants. In this research, data was collected by conducting interview techniques, observation and taking documentation. Validation of the data used is triangulation. Based on the results of the research carried out, the researchers found that the Financial Report of BUMDES Subur Makmur Lestari was in accordance with SAK EMKM but was not complete, as can be seen from the financial report that was made only the Financial Position Report (Balance Sheet) and Profit and Loss Report while the Notes to the Financial Report had not been made. The accountability of the financial report cannot be said to be accountable because it does not meet the three indicators of financial accountability. Financial integrity has not been maximally integrated, disclosure has not been conveyed to the general public and compliance with statutory regulations has been complied with in accordance with PP Number 11 of 2021 concerning BUMDES.

Keywords: accountability, Bumdes, financial reports

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Subur Makmur Lestari di Desa Wisata Tlogoweru Kecamatan Guntur Kabupaten Demak fokus pada penelitian ini yaitu Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Vertikal & Horizontal. Penelitian ini dilakukan di Desa

Tlogoweru Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan BUMDES dan informan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara melakukan teknik wawancara, observasi, dan pengambilan dokumentasi. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa Laporan Keuangan BUMDES Subur Makmur Lestari sudah sesuai dengan SAK EMKM tetapi belum lengkap bisa dilihat dari laporan keuangan yang dibuat hanya Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi sedangkan Catatan atas Laporan Keuangan belum dibuat. Akuntabilitas laporan keuangannya belum bisa dikatakan akuntabel karena belum memenuhi ketiga indikator akuntabilitas keuangan. Integritas keuangannya belum terintegritas secara maksimal, pengungkapannya belum tersampaikan kepada masyarakat umum dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sudah taat sesuai PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES.

Kata Kunci: akuntabilitas, Bumdes, laporan keuangan

PENDAHULUAN

Desa berperan sebagai garda paling dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa berkewenangan mengelola wilayah mereka sesuai UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang memperjelas bila pemerintah desa berkewajiban guna pengelolaan keuangan desa guna kepentingan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber keuangan desa diperoleh melalui bantuan pemerintah daerah ataupun pusat untuk mendukung peningkatan baik segi infrastruktur maupun segi administrasi. Selain bantuan pemerintah daerah dan pusat, salah satu sumber pendapatan desa diperoleh melalui kebijakan berupa pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai pengelola usaha milik desa dan wadah ekonomi produktif warga desa berdasar pada potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dimaksudkan supaya desa mempunyai pendapatan asli desa (PADES) yang layak guna menyejahterakan masyarakat desa.

Pendirian BUMDES dikelola oleh pemerintah desa yang melibatkan masyarakat secara langsung berdasar pada potensi yang bisa dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal terkait permintaan pasar. Tetapi, pendirian BUMDES bukan menjadi bagian dari paket instruksional yang muncul dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurut *The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)*, akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu prinsip berupa kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajibannya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, akuntabilitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang didasari oleh kode etik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan akuntabilitas memerlukan standar kompetensi atau kemampuan yang baik dalam pengelolaan BUMDES karena dapat berpengaruh terhadap output yang dihasilkan sesuai prinsip akuntabilitas. Menurut Afni (2017), kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu bentuk kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan sesuai

profesi yang dimiliki. Selain sumber daya manusia, faktor yang mempengaruhi proses akuntabilitas adalah komitmen dan sistem pengendalian internal dari organisasi tersebut. Menurut Adri (2017), komitmen organisasi menunjukkan sikap dalam merefleksikan loyalitas setiap anggota terhadap organisasi yang diikuti. Sistem pengendalian internal perlu dijalankan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Dalam pengawasan BUMDES dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berwenang melakukan fungsi pengawasan kinerja dan pelaporan keuangan kekayaan BUMDES.

Pemerintah telah mengucurkan anggaran nyaris Rp330 triliun untuk program Dana Desa dalam lima tahun terakhir. Namun, uang sebanyak itu rupanya belum dimanfaatkan secara optimal, terutama oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi mengenai evaluasi peranan BUMDES yaitu sebanyak 2.188 BUM Desa mangkrak alias terbengkalai alias tidak beroperasi dan sebanyak 1.670 BUM Desa yang berjalan tetapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa. Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyampaikan bahwa BUMDES ini hanya sekedar dibentuk, setelah itu tidak dikelola dengan baik. Misbah menerangkan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, BUMDES adalah salah satu sektor yang prioritas dibiayai oleh Dana Desa. Meski demikian, tak ada konsekuensi atau sanksi apapun bagi BUMDES yang menggunakan Dana Desa tetapi ternyata tak mampu berkontribusi banyak. Karena itu pada akhirnya pengelola BUMDES bekerja serampangan. Bukan tidak mungkin pula yang terjadi adalah praktik KKN, misalnya BUMDES dikelola orang dekat atau keluarga petinggi desa setempat.

Badan Pengawas Keuangan (BPK) juga pernah menemukan hal serupa. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2018, penggunaan Dana Desa oleh BUMDES bermasalah. BPK menyebut banyak BUMDES yang tidak beroperasi, tidak menyampaikan laporan, pendiriannya tidak didukung dengan studi kelayakan, dan belum tertib dalam hal tata usaha serta laporan. Tak hanya itu, BPK bahkan menemukan adanya penyalahgunaan dana BUMDES di dua desa di Lombok Tengah. (<https://tirto.id/kenapa-ribuan-bumdes-mangkrak-meski-dana-desa-triliunan-rupiah-enph> diakses pada 25 Juni 2023). Oleh sebab itu pentingnya laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah) guna sebagai alat pengawasan kinerja pengurus BUMDES dan Dana Desa yang digunakan sebagai modal. Beberapa studi perihal Akuntabilitas laporan keuangan BUMDES telah dilakukan sebelumnya, seperti Mahmudah (2018), dalam hasil penelitiannya Laporan keuangan yang dihasilkan masih sederhana berupa catatan Pemasukan dan Pengeluaran, sedangkan laporan keuangan konsolidasi yang sesuai PSAK belum bisa dihasilkan dikarenakan keterbatasan data yang ada. Kadek Rindi, dkk (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES Teja Kusuma ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah penelitian oleh Angelina Trimurti

Rambu Ana (2021) menunjukkan bahwa BUMDES Ina Huk belum menerapkan Akuntabilitas dan Tranparansi dalam pelaporan keuangannya, hal ini dikarenakan laporan keuangan yang dibuat belum sepenuhnya memenuhi standar laporan keuangan SAK EMKM. Studi milik Abdul Malik Akbar, dkk (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES Bina Sejahtera telah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan BUMDES dilihat dari laporan keuangan yang sudah terorganisir sesuai PSAK dan BUMDES telah melaporkan setiap setahun sekali dalam musyawarah desa ke pihak pemerintah desa dan masyarakat.

Salah satu wilayah yang sudah mengelola BUMDES adalah Desa Wisata Tlogoweru, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak dengan potensi di bidang pertanian berupa penangkaran *Tyto alba* (burung hantu) yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang guna wisata edukasi. BUMDES di Desa Tlogoweru bernama “BUMDES SUBUR MAKMUR LESTARI” berdiri pada 28 Juni 2021 dengan jenis usaha berupa wisata edukasi *Tyto alba* (burung hantu), usaha peternakan, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha sablon, usaha batik *Tyto alba*, usaha kuliner, usaha pengelolaan air bersih, usaha perdagangan, dan usaha simpan pinjam. BUMDES Subur Makmur Lestari juga menjadi BUMDES percontohan di Kecamatan Guntur karena secara administrasi dan pengelolaan BUMDES Subur Makmur Lestari sudah resmi mendapatkan sertifikat dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga dijadikan percontohan bagi desa-desa lain yang berada disekitarnya terkait pendirian BUMDES. Permasalahan di BUMDES Subur Makmur Lestari yaitu kondisi BUMDES yang masih merintis dan lemahnya kemampuan pengelolaan BUMDES sehingga pentingnya akuntabilitas laporan keuangan guna mengukur kinerja BUMDES.

Operasional BUMDES Subur Makmur Lestari diatur dalam Peraturan Desa No. 4 Tahun 2021 mengenai Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Subur Makmur Lestari” yang didukung dengan fasilitas berupa gedung serbaguna untuk kantor yang beroperasi pada hari Sabtu untuk melakukan pelayanan unit usaha simpan pinjam terhadap masyarakat. Pengelola BUMDES haruslah mengelola potensi yang ada di desanya dengan baik serta dapat memberikan laporan dari apa yang telah dikerjakannya, termasuk laporan biaya pengeluaran dan pemasukkan BUMDES. UU No 4 tahun 2015 Bab III pasal 12 ayat 3 yang menyatakan bahwa pelaksana operasional berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDES yang dibuat dalam sistem akuntansi yang sederhana. Pentingnya akuntabilitas laporan keuangan BUMDES Subur Makmur Lestari untuk mengukur kualitas kinerja pengelola BUMDES, guna menjaga kepercayaan Masyarakat dan menjaga eksistensi BUMDES sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Berdasar berbagai literatur, akuntabilitas laporan keuangan BUMDES di berbagai wilayah penting dilakukan karena semakin tingginya permintaan dan tuntutan oleh masyarakat terhadap akuntabilitas untuk mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka akan meningkatkan akuntabilitas yang baik juga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *case studies* (studi kasus) yang menggunakan bukti empiris pada satu atau lebih organisasi, dan penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, persiapan, dan analisis data sehingga mendapat gambaran jelas terhadap masalah yang diteliti. Data hasil penelitian dikumpulkan menggunakan teknik wawancara. Metode analisis deskriptif bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif bermaksud memahami fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian misalnya berupa perilaku, persepsi, motivasi, hingga tindakan secara holistik dan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata, serta pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM pada BUMDES Subur Makmur Lestari

Laporan Keuangan Lengkap

Menurut PSAK No. 1 “Laporan Keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Daftar tersebut berupa daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau rugi laba. Kemudian peneliti menemukan di lapangan bahwa untuk laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi sudah menerapkan laporan keuangannya berdasarkan SAK EMKM namun untuk Catatan atas Laporan Keuangan belum dibuat oleh BUMDES Subur Makmur Lestari sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan BUMDES Subur Makmur Lestari belum lengkap. Maka dari itu penelitian ini memberikan format rancangan Catatan atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM sehingga dapat digunakan oleh BUMDES Subur Makmur Lestari untuk melengkapi Laporan Keuangannya.

Dalam SAK EMKM laporan keuangan entitas yang lengkap meliputi:

1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Posisi Keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode. Laporan posisi keuangan ini menunjukkan sumber daya yang dimiliki oleh BUMDES, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi kinerja terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut:

a) Pendapatan

b) Beban

Dalam membuat laporan keuangan laba rugi adapun data yang dibutuhkan antara lain:

- a) Data seluruh pendapatan pada BUMDES Subur Makmur Lestari mulai dari pendapatan semua unit usaha yang ada.
- b) Data semua beban yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha BUMDES Subur Makmur Lestari seperti beban operasional, beban perlengkapan serta beban-beban yang bersangkutan dengan kegiatan usaha.
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM, Ikhtisar kebijakan akuntansi, serta informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif, IAI (2009). Penerapan SAK EMKM, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa laporan keuangan sudah menyajikan kinerja keuangan dan arus kas entitas yang ada di BUMDES Subur Makmur Lestari. Penyajian keuangan di BUMDES Subur Makmur Lestari sudah bisa dikatakan wajar karena sudah memenuhi aspek-aspek penyajian laporan keuangan yang wajar menurut SAK EMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian antara nota/bukti transaksi dengan laporan keuangan yang dicatat sudah sesuai.

Kepatuhan terhadap SAK EMKM

Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK EMKM, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa BUMDES Subur Makmur Lestari belum dikatakan patuh terhadap SAK EMKM, karena walaupun sudah membuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi sesuai SAK EMKM namun belum membuat Catatan atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar SAK EMKM. Hal tersebut dikarenakan kurangnya

pengetahuan pengurus BUMDES Subur Makmur Lestari terkait Standar Akuntansi Keuangan sehingga Catatan atas Laporan Keuangan nya belum dibuat.

Frekuensi Pelaporan

Entitas harus menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatif minimum satu tahun sekali. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa BUMDES Subur Makmur Lestari menyajikan pencatatan keuangan tahunan berupa Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Arus Kas serta menyajikan laporan keuangan satu tahun sekali. Laporan keuangan yang disajikan belum lengkap sesuai dengan SAK EMKM.

Penyajian yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam SAK EMKM bab 9 tentang kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan, atau SAK EMKM mensyaratkan suatu perubahan penyajian. Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa dalam penyajian laporan keuangan BUMDES Subur Makmur Lestari sudah konsisten dibuat secara periodik dan sudah mengklasifikasikan akun-akun dalam laporan keuangannya dan sudah sesuai dengan standar SAK EMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan posisi keuangan sudah mengklasifikasikan antara akun Aset, Modal dan Liabilitas kemudian pada laporan laba rugi sudah mengklasifikasikan akun pendapatan dan beban.

Informasi Komparatif

Informasi komparatif merupakan angka-angka dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan satu atau lebih periode lalu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kecuali dinyatakan lain oleh SAK EMKM, entitas menyajikan informasi komparatif yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat BUMDES Subur Makmur Lestari sudah memasukkan informasi komparatif yang sesuai dengan SAK EMKM sehingga baik pihak internal maupun eksternal dapat memahami karena sudah sesuai dengan standar SAK EMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan yang sudah memuat rincian pemasukan dan pengeluaran BUMDES Subur Makmur Lestari.

Materialitas dan Agregasi

Akun-akun yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa BUMDES Subur Makmur Lestari dalam membuat laporan keuangan sudah memperhatikan tingkat materialitas dalam melakukan suatu transaksi. Dalam penyajian laporan keuangan akun beban sudah dipisahkan dan diklasifikasi berdasarkan sifat dan fungsinya.

Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Subur Makmur Lestari

Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban terhadap pihak yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu yang nantinya kegagalan ataupun keberhasilan dalam melakukan tugas terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu yang menyebabkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bisa berkembang atau tidak adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam laporan keuangan. Menurut Dixon *et al.*, (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas publik dapat diwujudkan kedalam dua bentuk. Pertama akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas tingkat yang lebih tinggi atau pemberi tugas, yang kedua akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat. Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang kemudian dapat dikomunikasikan kepada pihak internal dan pihak eksternal secara periodik sebagai suatu kewajiban hukum untuk memberikan pertanggungjawabannya.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa BUMDES Subur Makmur Lestari telah melakukan prinsip akuntabilitas vertikal dengan baik hal ini dibuktikan dengan membuat laporan keuangan secara periodik dan dilaporkan kepada pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dana BUMDES Subur Makmur Lestari. Terkait dengan laporan pertanggungjawaban dana BUMDES yang dilakukan oleh pengurus BUMDES, dilakukan setiap bulan nya di Musdes/Musyawahar Desa dengan cara memberikan laporan keuangan kepada Pemerintah Desa kemudian laporan keuangan tersebut dilanjutkan ketingkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) dengan cara mengirim file kepada Kementrian desa. Kemudian untuk akuntabilitas horizontal BUMDES Subur Makmur Lestari belum melakukan prinsip akuntabilitas horizontal dengan baik hal ini dibuktikan dengan hanya ada beberapa perwakilan warga yang mengetahui laporan keuangan BUMDES dan warga desa Tlogoweru mengetahui tentang dana desa melalui benner/baliho dan website resmi desa (<http://tlogoweru.desa.id>) yang di buat oleh pemerintah desa setempat. Untuk laporan keuangan BUMDES seacara detail warga desa belum terlalu mengetahui hanya ada beberapa

perwakilan warga yang mengetahui saat ikut dalam Musyawarah Desa/Musdes.

Akuntabilitas Laporan Keuangan BUMDES Subur Makmur Lestari

Akuntabilitas laporan keuangan perlu ditekankan mengingat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa yang menjadi modal serta pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengurus BUMDES. Menurut penelitian (Rambu Ana & Ga, 2021) terdapat 3 komponen yang menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan yaitu integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan menghasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam hal pengambilan keputusan, tiga komponen tersebut menjadi indikator untuk mengukur akuntabilitas keuangan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa pemahaman pengurus BUMDES terkait akuntabilitas masih sedikit. Akuntabilitas laporan keuangan BUMDES Subur Makmur Lestari belum bisa dikatakan akuntabel karena belum memenuhi ketiga indikator untuk mengukur akuntabilitas. Indikator pertama Integritas keuangannya masih belum lengkap karena belum dibuatnya catatan atas laporan keuangan hal ini karena pengurus tidak mengetahui bahwa Standar Akuntansi Keuangan memuat sampai catatan atas laporan keuangan. Indikator kedua pengungkapan terkait hal ini laporan keuangan BUMDES Subur Makmur Lestari belum diketahui oleh masyarakat karena pengurus belum mempublikasi laporan keuangan diakses secara umum. Indikator ketiga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan BUMDES Subur Makmur Lestari mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2021 Bab X tentang pertanggungjawaban BUMDES dengan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban, hal ini BUMDES Subur Makmur Lestari sudah taat dibuktikan dengan membuat laporan keuangan berkala memuat laporan tahunan dan semesteran.

Tabel 1. Indikator Akuntabilitas Keuangan

INTEGRITAS KEUANGAN	Belum terintegrasi secara maksimal karena dari 3 laporan keuangan yang wajib ada hanya 2 laporan keuangan saja yang dibuat yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi saja.
PENGUNGKAPAN	Dari segi pengungkapan hal ini sudah dilakukan kepada pemerintah desa namun masih belum tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat umum.
KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Dari segi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan BUMDES Subur Makmur Lestari mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES sudah taat dibuktikan dengan membuat laporan berkala memuat laporan keuangan tahunan dan semesteran.

Sumber: Diolah, 2023.

Kesimpulan dan Saran

Akuntabilitas laporan keuangan BUMDES Subur Makmur Lestari belum akuntabel karena belum memenuhi ketiga indikator akuntabilitas keuangan yaitu integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap perundang-undangan. BUMDES Subur Makmur Lestari belum terintegrasi secara maksimal karena dari 3 laporan keuangan yang wajib ada hanya 2 laporan keuangan saja yang dibuat, yaitu laporan posisi keuangan (Neraca) dan laporan laba rugi sedangkan satu laporan keuangan yang kurang adalah Catatan atas Laporan Keuangan. Dari segi pengungkapan hal ini sudah dilakukan kepada pemerintah desa namun masih belum tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat umum. Dari segi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan BUMDES Subur Makmur Lestari mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES. Saran untuk pihak BUMDES Subur Makmur Lestari kedepannya harus memberikan informasi kepada masyarakat desa mengenai laporan keuangan BUMDES sehingga masyarakat lebih percaya kepada kinerja BUMDES.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M. (2022). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN BUMDES BINA SEJAHTERA KEMBANG KERANG, KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *Pengelolaan Bumdes Bina Sejahtera Kembang*, 716–725.
- Amir H. dan Gusnardi. 2018. *Prospek Implementasi Standar Akuntansi: Entitas Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kualitas Laporan Keuangan Yang Berlaku Efektif Per 1 Januari 2018*. Bandung: SADARIPRESS
- BUMDES Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan. <https://tirto.id/kenapa-ribuan-bumdes-mangkrak-meski-dana-desa-triliunan-rupiah-enph>, diakses pada tanggal 25 Juni tahun 2023.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. *PSAK No 1 Penyajian Laporan Keuangan (edisi revisi 2009)*. Jakarta: IAI
- Dixon, R., Ritchie, J.& Siwale, J. 2006. Microfinance: Accountability from The Grassroots. *Accounting Auditing & Accountability Journal*. Vol. 19, No. 3: 405-427
- Ikatan Akuntan Indonesia.2009. "Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik". Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia.2015. "Standar Akuntan Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah". Jakarta: Salemba Empat
- Lestari, B. P. (2022). *Laporan tahunan*.
- Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). *Ecopreneur*.12, 1(2), 32. <https://doi.org/10.51804/econ12.v1i2.376>
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi sektor publik*, Andi: Yogyakarta
- Peraturan Desa Tlogoweru Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Subur Makmur Lestari
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha

- Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Rindi, Kadek, Luh Putu Mas Sintia Arsani Dewi, Dyah Ari Puspita Sari, dan Putu Pania Awitiana. 2017. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Vol. 7, No.1
- Sofyan Syafri Harahap, 2018. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.